

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017



**DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BULELENG
2018**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan selama tahun 2017. Melalui laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran dan telaahan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan ke dalam perencanaan strategik sebelumnya.

Walaupun di dalam penyusunannya diusahakan secara optimal, namun laporan ini tetap saja mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dari pihak terkait sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Singaraja, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Buleleng.



Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620608 198203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi	1
D. Isu Strategis Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng	5
B. Penetapan Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Setingkat Eselon II, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan membantu Bupati melaksanakan urusan pemeritahan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian.
2. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok tersebut diatas, ditetapkan dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, dan Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng.
3. Dari kedua tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak diwujudkan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah: Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng, dan Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng.
4. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2017.
5. Dari hasil pengurukuran IKU yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, seluruh indikator telah dapat tercapai 100%. Sedangkan pada sisi keuangan, secara keseluruhan tercapai 97,59%.
6. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terdapat permasalahan yang prinsipil yang dapat menghambat atau mengganggu keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pada umumnya program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Walaupun tidak terdapat hal-hal yang prinsipil, namun terbitnya regulasi (Undang-undang) terbaru perlu menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan tidak menjadi masalah. Demikian pula dalam pemberian pelayanan informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan relevan dengan mempergunakan layanan Web Site <http://www.bulelengkab.go.id>; E-Mail: kominfo@bulelengkab.go.id dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara bertahap meningkatkan profesionalisme aparatur yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

C. Data Umum Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, yang dalam dokumen ini selanjutnya disebut Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas ini merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng adalah Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian, sedangkan fungsinya antara lain:

1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis yang saat ini dihadapi oleh Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng adalah:

1. Rendahnya penyebarluasan informasi publik ke masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sebagai lembaga publik, Pemerintah daerah wajib untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi, yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang undang Dasar 1945 pasal 28 F, dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Selain sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia, penyebarluasan informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan, sebab tanpa adanya penyebarluasan informasi ini, masyarakat tidak akan mengetahui proses pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga akan menghambat peran serta masyarakat dalam ikut melaksanakan pembangunan.

Luas wilayah, kondisi geografis, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat ini. Kehadiran berbagai media komunikasi saat ini, seperti media elektronik (radio), media cetak (surat kabar dan majalah), media tradisional (bondres), media interpersonal (ceramah, dialog, sosialisasi), media luar ruang (baliho, pamflet, leaflet) serta media internet (website, facebook, istagram), menjadi peluang bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng, dalam usahanya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya.

2. Rendahnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*) maka dibutuhkan penerapan *electronic government* (e-gov) yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov.

Saat ini, seluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng telah terhubung dalam jaringan online sistem, namun pemanfaatannya masih sangat kurang, sehingga komunikasi data antar SKPD belum dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari piranti lunaknya, sebagian besar SKPD juga telah memiliki aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk menunjang kinerja SKPD tersebut, baik yang dibuat sendiri bersama pihak ke-3 maupun yang didapatkan dari pemerintah pusat, namun aplikasi-aplikasi tersebut masih berdiri sendiri, belum bisa saling bertukar data atau menggunakan data bersama. Hal ini disebabkan karena perbedaan platform yang digunakan oleh masing-masing aplikasi sistem informasi tersebut. Selain itu juga, sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dibidang TIK masih sangat kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga pemanfaatan sumber daya TIK yang ada belum optimal.

Selain dari tiga aspek yang telah dijelaskan di atas (jaringan, aplikasi dan SDM), masalah regulasi juga menjadi penghambat dari implementasi e-government di Kabupaten Buleleng, karena hingga saat ini belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang implementasi e-Government di Kabupaten Buleleng. Regulasi yang ada saat ini masih berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang baru mengatur beberapa bagian saja dari pembangunan dan implementasi e-Government di Kabupaten Buleleng, belum secara keseluruhan.

Berbagai hal tersebut di atas ini lah yang menjadi tantangan bagi Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas untuk membangun dan mengembangkan e-Government di Kabupaten Buleleng.

3. Rendahnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng. Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi memberikan kemajuan dan kemudahan bagi manusia, di sisi yang lain memberikan ancaman bagi manusia itu sendiri. Karena jika disalah gunakan kemajuan TIK ini akan dapat membahayakan dan merugikan manusia.

Keamanan data dan informasi milik Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan, karena akan dapat mengganggu sistem pemerintahan dan stabilitas keamanan daerah. Sistem keamanan data dan informasi inilah yang menjadi persoalan yang dihadapi saat ini, karena kemajuan teknologi menyebabkan orang semakin mudah untuk mendapatkan data dan informasi milik Pemerintah Daerah, sehingga dibutuhkan sistem dan teknologi yang terus mengikuti perkembangan TIK tersebut.

Selain data dan informasi yang harus dijaga keamanannya, maka orang-orang penting (Very Very Important Person/ VVIP), tempat-tempat strategis, maupun kegiatan-kegiatan penting milik Pemerintah Daerah juga harus dijaga keamanannya dari sisi TIK. Keamanan yang dimaksud disini adalah kewanan non fisik, seperti keamanan komunikasi data antar pimpinan daerah, pengamanan tempat maupun kegiatan menggunakan teknologi informasi, dan lain sebagainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng

1. Visi dan Misi

Dinas Kominfosandi Kab. Buleleng sebagai instansi milik Pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung sepenuhnya visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Buleleng. Visi Kepala Daerah tahun 2012-2017 ini adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari Berdasarkan Tri Hita Karana”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah 7 buah misi pembangunan Kabupaten Buleleng. Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Kominfosandi secara langsung berperan dalam misi keempat, yaitu: **“Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan pembangunan”**.

2. Tujuan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika
- b. Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng

3. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat
 - b. Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng
 - c. Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng
- Rincian perencanaan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					Kondisi Akhir
					2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika	Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	%	72,97	91,89	92,31	97,44	100,00	100,00
2.	Meningkatkan pengamanan komunikasi dan informasi milik Pemkab Buleleng	Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng	Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data opini dan tema publik
- b. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat
- c. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
- d. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media komunikasi
- e. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya komunikasi
- f. Pengembangan dan pemberdayaan jaringan online Pemkab. Buleleng
- g. Penyusunan kajian terkait pengembangan TIK
- h. Peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK
- i. Pengembangan Aplikasi
- j. Pengembangan Ekosistem e-Government
- k. Pengembangan Tata Kelola e-Government
- l. Pelaksanaan operasional dan pengamanan Persandian
- m. Pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi pengamanan persandian
- n. Pengembangan tata kelola persandian.

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data opini publik yang muncul pada media cetak, elektronik dan online (sosial media)
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data tema komunikasi publik yang sedang berkembang di masyarakat
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling dan pelayanan multimedia
- d. Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pembangunan daerah
- e. Menyebarluaskan informasi melalui Pameran Pembangunan
- f. Menyebarluaskan informasi melalui penerbitan majalah
- g. Menyebarluaskan informasi melalui media tradisional
- h. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)
- i. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat
- j. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi
- k. Mengembangkan dan memelihara jaringan online Pemkab Buleleng
- l. Mengelola server dan kelengkapannya

- m. Penyediaan layanan internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat
- n. Pengumpulan dan pengolahan data
- o. Menyusun kajian-kajian dalam rangka pengembangan TIK di Pemkab Buleleng
- p. Melakukan pengembangan dan pengelolaan fasilitas pengembangan SDM bidang TIK
- q. Melakukan pelatihan SDM di bidang TIK
- r. Mengelola dan mengembangkan layanan pengadaan secara elektronik
- s. Membangun, mengembangkan dan memonitor aplikasi layanan Pemkab Buleleng
- t. Pengembangan dan pengelolaan nama domain dan subdomain
- u. Pengembangan dan pengelolaan situs resmi Pemkab Buleleng
- v. Penyusunan regulasi dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penerapan e-government
- w. Peningkatan kapasitas tenaga teknis Dinas Kominfosandi terkait penerapan e-government
- x. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap orang (vvip), tempat strategis, dan kegiatan strategis yang dilaksanakan/terkait dengan Pemkab Buleleng
- y. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan persandian yang dilakukan
- z. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengaman persandian yang dimiliki
- aa. Menyusun regulasi/ kebijakan terkait pengamanan komunikasi dan informasi di lingkup Pemkab Buleleng
- bb. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang persandian

6. Program Pencapaian Sasaran

Program yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- d. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- e. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- f. Program Pengelolaan Layanan e-Government
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Penetapan Kinerja

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat	3 1. Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	4 0%	5 1. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6 300.000.000 724.000.000
2.	Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng	1. Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	100%	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 4. Program Pengelolaan Layanan e-Government	1.217.000.000 160.000.000 215.400.000 704.784.000
3.	Terjaminnya keamanan data dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting	1. Persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng	100%	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	616.736.800

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2017, berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, maka pemerintah daerah sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Sehingga salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, untuk memperoleh informasi dapat dipenuhi dengan baik.

Masyarakat yang tidak puas dengan layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dapat melakukan gugatan informasi terhadap instansi pemerintah daerah yang tidak memenuhi kebutuhan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Hal inilah yang dijadikan indikator atas sasaran 1 (satu), sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu informasi.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2017 terhadap Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	0%	0%	0%	100,00	0%	100,00

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017

Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat yang semula ditargetkan sebesar 0%, yang artinya tidak satupun SKPD lingkup Pemkab Buleleng mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat, dapat

direalisasikan sebesar 0% atau tercapai 100,00%. Hal ini disebabkan karena seluruh SKPD telah berusaha memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang mengajukan gugatan informasi kepada Pemkab Buleleng, maupun SKPD di bawahnya.

b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian antara tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 1, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tidak ada SKPD lingkup Pemkab Buleleng yang mendapatkan gugatan/ sengketa informasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebutuhan masyarakat akan informasi dari Pemerintah Daerah sudah dapat dipenuhi dengan baik, sehingga tidak terjadi gugatan/ sengketa informasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir renstra

Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir renstra, maka pencapaian kinerja tahun 2017 ini telah mencapai 100%. Sehingga demikian apa yang diharapkan atau ditargetkan pada akhir tahun Renstra periode ini telah tercapai.

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari capaian yang telah dijelaskan di atas, bahwa transparansi informasi sebagai implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh SKPD lingkup Pemkab Buleleng. Walaupun pencapaiannya telah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan, namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga ke depan, capaian ini dapat terus dipertahankan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya informasi, sehingga Pemerintah Daerah harus siap dengan informasi-informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini.
- 2) Meningkatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini semakin memudahkan orang untuk menyebarkan informasi baik informasi yang benar maupun tidak benar (hoax) yang menyesatkan, untuk itu perlu dilakukan monitoring terhadap isu yang berkembang di masyarakat dan berbagai media online (internet). Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi yang benar atas isu yang beredar tersebut.

e. Efisiensi penggunaan sumber daya

Realisasi kinerja pada Sasaran 1, dari kedua indikator tersebut berhasil dicapai sebesar 100,00% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 99,04%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Realisasi keuangan yang kurang dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak, dan foto copy.

f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk dapat mencapai Sasaran 1 ini, maka terdapat 2 Program dan 10 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah:

- 1) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi
- Pembinaan dan pengembangan kelompok komunikasi sosial masyarakat
- Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa
- Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik

2) Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Opini Publik
- Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema
- Pelayanan Informasi Publik

2. Sasaran 2: Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka salah satu sistem yang dapat dilakukan adalah mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-Government. Untuk itu diharapkan seluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng dapat menerapkan e-government sesuai standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan ini merupakan standar minimal yang berlaku satu periode Renstra, dan selanjutnya dikaji untuk ditetapkan standar baru sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2017 terhadap (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase SKPD yang Menerapkan e-Government Sesuai Standar	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

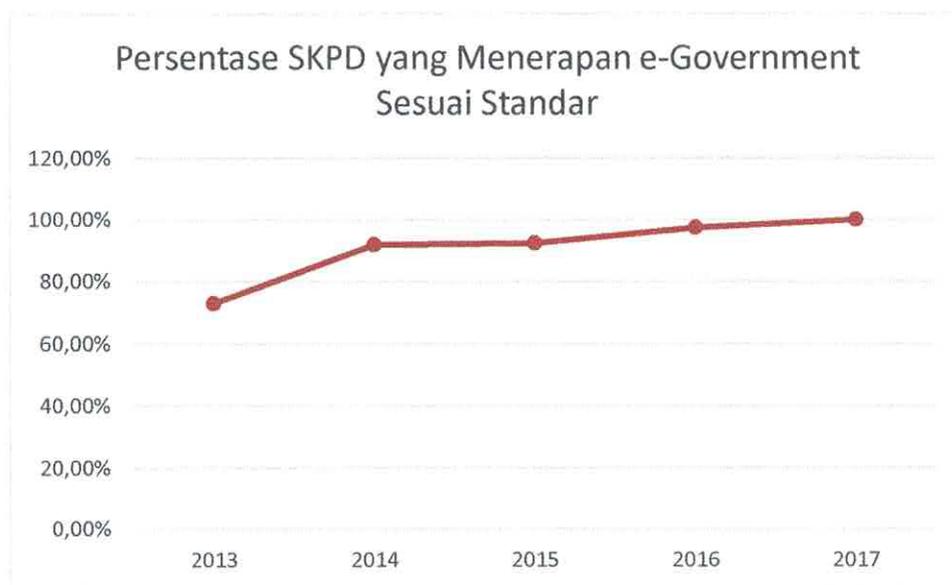
a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017

Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar yang ditargetkan sebesar 100,00% dapat direalisasikan sebesar 100,00% atau tercapai

100,00%. Ketercapaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh SKPD yang terkoordinasi dalam Tim Percepatan e-Government Pemkab Buleleng. Sehingga dari 5 indikator yang ditetapkan sebagai Standar Dasar Penerapan e-Government di Pemkab Buleleng, maka seluruh SKPD dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian antara tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 2, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Persentase SKPD yang Menerapkan e-Government Sesuai Standar dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas terlihat peningkatan capaian sasaran ini dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perubahan yang positif dari seluruh SKPD lingkup Pemkab Buleleng dalam menerapkan e-Government di tempatnya masing-masing. Sehingga pencapaiannya memberikan dampak pada pencapaian Pemkab Buleleng secara keseluruhan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir renstra

Jika dilihat realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir renstra, maka pencapaian kinerja tahun 2017 ini telah mencapai 100%. Sehingga demikian apa yang diharapkan atau ditargetkan pada akhir tahun Renstra periode ini telah tercapai.

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai target seperti yang diharapkan. Hal ini selain disebabkan karena adanya komitmen seluruh SKPD dalam melaksanakan/ memenuhi standar penerapan e-Government.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM aparatur dibidang TIK di seluruh SKPD yang cukup menghambat percepatan penerapan implementasi e-Government di Pemkab Buleleng. Sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang TIK untuk SDM aparatur yang masih belum memiliki kemampuan dibidang TIK.
- 2) Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangatlah cepat, yang dapat menyebabkan perangkat maupun sistem yang digunakan dalam e-Government tidak berfungsi secara optimal. Sehingga dibutuhkan pembaharuan/ update teknologi yang memungkinkan seluruh komponen dalam e-Government dapat berdaya guna dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

e. Efisiensi penggunaan sumber daya

Realisasi kinerja pada Sasaran 2, dari indikator tersebut berhasil dicapai sebesar 100,00% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 98,64%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi keuangan dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.

f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk dapat mencapai Sasaran 2 ini, maka terdapat 3 Program dan 9 Kegiatan yang mendukung. Program-program tersebut adalah

- 1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak

- Penyediaan layanan akses internet
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 - Pengumpulan dan pengolahan data
 - Pengembangan dan Pengolahan Data Center
- 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - Pengelolaan fasilitasi pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika

3. Sasaran 3: Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini selain memberikan keuntungan namun juga dapat memberikan kerugian bagi umat manusia. Untuk itu, salah satu tugas pokok persandian adalah menjaga keamanan data dan informasi milik pemerintah daerah, baik itu komunikasi orang-orang penting Pemkab Buleleng, pengawasan pengamanan tempat-tempat strategis/penting milik Pemkab Buleleng, dan juga pengamanan data/ informasi milik Pemerintah Daerah.

Pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan ini dipantau oleh Lembaga Sandi Negara RI, sehingga secara periodik dilaporkan proses pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2017 terhadap Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

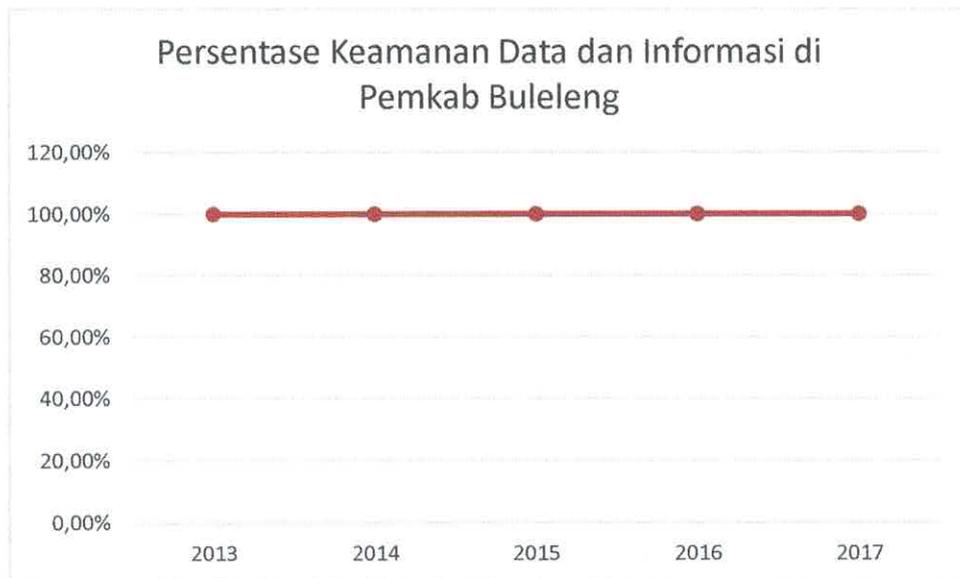
a. *Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017*

Pengukuran indikator ini berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengamanan data dan informasi (operasional persandian) di Kabupaten Buleleng, terhadap orang-orang penting di Pemkab Buleleng, tempat-tempat penting/strategis milik Pemkab Buleleng, dan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng. Dari hasil pelaksanaan tersebut, diketahui bahwa tidak didapatkan gangguan keamanan atas data dan informasi yang tidak dapat diatasi atau dihadapi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dari target 100,00% persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng pada tahun ini, dapat direalisasikan sebesar 100% atau tercapai 100% dari target. Ketercapaian ini yang harus terus dipertahankan sehingga stabilitas keamanan khususnya di bidang data dan informasi milik Pemkab Buleleng dapat terjaga.

b. *Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian antara tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 3, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 6. Grafik persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pengamanan data dan informasi yang dilaksanakan telah memberikan keamanan di bidang data dan informasi milik Pemkab Buleleng,

sehingga gangguan terhadap data dan informasi dapat ditangani dengan baik, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pemkab Buleleng maupun masyarakat.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir renstra*

Bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2017 dengan target akhir renstra, maka telah tercapai 100,00% dari target 100,00% atau mencapai 100,00%. Untuk itu harapan dapat menjaga keamanan data dan informasi milik Pemkab Buleleng di target akhir renstra dapat terwujud dengan baik dan segala bentuk gangguan terhadap data dan informasi ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.

d. *Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai target seperti yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari koordinasi yang baik antar SKPD Lingkup Pemkab Buleleng dan Lembaga Sandi Negara RI, yang senantiasa mendukung segala proses pengamanan yang dilakukan, sehingga segala bentuk gangguan terhadap data dan informasi dapat ditangani dengan baik..

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dan solusi yang dilakukan untuk mengatasinya, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rentannya perangkat komunikasi radio, yang digunakan untuk menangani seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng, terhadap gangguan cuaca/ alam, yang dapat menyebabkan terputusnya komunikasi. Untuk itu dilakukan monitoring dan perawatan secara berkala terhadap perangkat-perangkat luar yang terpasang tersebut, sehingga keandalannya dapat dipertahankan.
- 2) Kesadaran akan keamanan data dan informasi di kalangan aparatur pemerintah masih sangat kurang, yang dapat menyebabkan mudahnya pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pencurian bahkan pengrusakan data dan informasi milik Pemerintah daerah. Untuk itu dilakukan sosialisasi kepada aparatur pemerintah tentang keamanan data dan informasi, agar dapat lebih berhati-hati dalam membuat, mengirim atau menyebarkan informasi penting milik Pemkab Buleleng.

e. *Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi kinerja pada Sasaran 3, dapat tercapai sebesar 100,00% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 98,27%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi keuangan dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi

pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.

f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk dapat mencapai Sasaran 3 ini, maka terdapat 1 Program dan 4 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Sumber Daya Persandian
- Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Persandian
- Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi
- Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

B. Realisasi Anggaran

Dari total keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebesar Rp.6.727.000.000,00 (*enam milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp.6.564.797.809,00 (*enam milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) atau mencapai 97,59% (*sembilan puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen*). Sedangkan anggaran pada program-program bidang komunikasi, informatika dan persandian (sesuai dengan Perjanjian Kinerja/ Tabel 2.2 di atas) sebesar Rp.3.909.027.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.824.126.179,00 atau mencapai 97,83%.

Pada sasaran ke-1, Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat, dari anggaran Rp.1.024.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.011.335.141,00 atau tercapai 98,76%. Sedangkan pada sasaran ke-2, Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab. Buleleng, sebesar Rp.2.297.484.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.235.425.602,00 atau tercapai 97,30%.

Untuk sasaran ke-3, Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng, dari anggaran Rp.587.543.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.577.365.436,00 atau tercapai 98,27%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		Nama Program	Keuangan		%Realisasi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat	1. Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	0%	0%	1. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	300.000.000	299.090.780	99,70
					2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	724.000.000	719.244.361	98,38
2.	Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab. Buleleng	1. Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	100,00%	100,00%	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1.204.000.000	1.196.619.517	99,39
					2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	160.000.000	157.310.808	98,32
					3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	203.700.000	196.550.903	96,49
					4. Program Pengelolaan Layanan e-Government	729.784.000	684.944.374	93,86
3.	Meningkatnya penerapan pengamanan data dan informasi Pemkab Buleleng	1. Persentase keamanan data dan informasi di Pemkab Buleleng	100,00%	100,00%	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	587.543.000	577.365.436	98,27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, laporan ini menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan ini akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, Laporan ini memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 tahun 2016 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2017 rata-rata mencapai mencapai 100,00%. Hal ini karena seluruh indikator dapat tercapai 100%. Sedangkan pada bagian keuangan, realisasi mencapai 97,83%. Sisa anggaran lebih dikarenakan efisiensi anggaran yang ada, sehingga terjadi sisa pada anggaran, ATK, foto copy, BBM, perjalanan dinas, dan beberapa mata anggaran lainnya. Dari hasil analisis yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2017 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga jika dilihat dari trend perkembangannya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, apa yang telah ditargetkan di akhir tahun renstra dapat tercapai.

Beberapa persoalan dan tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pada tahun mendatang antara lain:

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan orang untuk menyebarluaskan dan mendapatkan informasi sehingga monitoring atas isu/ informasi yang berkembang harus dilakukan, dan responsifitas Pemerintah daerah harus ditingkatkan guna menangani informasi yang menyesatkan atau tidak benar (hoax) agar jangan sampai informasi tersebut menjadi pengganggu stabilitas keamana daerah.
2. Masih adanya SKPD yang memiliki sistem informasi/aplikasi namun belum terintegrasi atau diterapkan dalam jaringan online system, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan dibuatnya regulasi yang mengatur pengadaan dan penerapan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum mampu memanfaatkan TIK dalam kegiatannya, sehingga pelatihan-pelatihan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.
4. Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap keamanan data dan informasi milik Pemkab Buleleng ini juga harus menjadi perhatian, karena dari sinilah peluang atau kemungkinan kejahatan/ gangguan terhadap orang-orang penting, tempat-tempat strategis dan kegiatan-kegiatan penting Pemkab Buleleng dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik. Untuk itu perlu dilakukan pengamanan dan peningkatan kemampuan dibidang keamanan data dan informasi, agar daapt menghadapi ataupun mengatasi permasalahan keamanan yang tak tampak secara nyata ini.

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.